

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 7, 2024, Halaman 149-161
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.12520971)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12520971>

Perbandingan Manajemen Utang Sri Lanka dan Indonesia Terhadap World Bank (Bank Dunia)

Nurhana Putri Isna^{1*}, Rizki Dhiya Ramadhani², Tiur Margaretha³, Shangra Mulalugina⁴, Fikri Fakhrial Amin⁵, Delliq Hastariq Athfal⁶, Neneng Yani Yuningsih⁷

¹⁻⁷Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang

*Email korespondensi: nurhana21001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Sri Lanka dan Indonesia merupakan dua negara yang memiliki hubungan utang yang besar kompleksitas pengelolaan utang internasional. Keduanya harus menghadapi berbagai kebijakan dan strategi untuk menangani utang mereka, termasuk isu-isu seperti suku bunga, persyaratan, struktur pembayaran, serta dampak politik dan ekonomi. Meningkatnya utang sering kali merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang ambisius, namun dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan keuangan jangka panjang. Pengelolaan utang negara adalah proses pengelolaan utang yang dimiliki suatu negara. Tujuan utamanya adalah menjamin keberlanjutan keuangan negara dan mencegah krisis yang dapat merugikan perekonomian secara keseluruhan (Aribowo et al., 2023). *Debt Management Office* (DMO) adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh pemerintah Sri Lanka dan Indonesia untuk mengelola utang dengan lebih efektif. Dengan menggunakan DMO, kedua negara dapat mengelola utang mereka dengan lebih efisien, meningkatkan keberlanjutan keuangan, dan mengurangi risiko yang terkait dengan utang luar negeri. Perbandingan antara Sri Lanka dan Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan DMO yang kuat dan independen sangat penting untuk pengelolaan utang yang efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: infrastruktur, investasi, keuangan negara, manajemen, utang luar negeri

Abstract

Sri Lanka and Indonesia are two countries that have a large debt relationship, the complexity of international debt management. Both must confront a variety of policies and strategies to deal with their debt, including issues such as interest rates, terms, payment structures, and political and economic impacts. Rising debt is often part of ambitious economic development strategies, but can raise concerns about long-term financial sustainability. State debt management is the process of managing the debt owned by a country. The main goal is to ensure the sustainability of state finances and prevent crises that could harm the economy as a whole (Aribowo et al., 2023). The Debt Management Office (DMO) is one approach that the Sri Lankan and Indonesian governments can use to manage debt more effectively. By using DMO, both countries can manage their debt more efficiently, improve financial sustainability and reduce the risks associated with external debt. A comparison between Sri Lanka and Indonesia shows that a strong and independent DMO approach is essential for effective and sustainable debt management.

Keywords: infrastructure, investment, state finance, management, foreign debt

Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 18 June 2024

Accepted date: 23 June 2024

PENDAHULUAN

Manajemen utang merupakan aspek penting dalam kebijakan ekonomi suatu negara, terutama ketika negara tersebut memiliki utang signifikan terhadap kreditor tertentu (Mahyarni & Meflinda, 2022). Indonesia dan Sri Lanka merupakan kedua negara yang memiliki utang signifikan terhadap World Bank yakni berupa sebuah hubungan yang mencerminkan kompleksitas dan tantangan dalam manajemen utang internasional. Kedua negara ini dihadapkan pada berbagai kebijakan dan strategi untuk mengelola utang mereka terhadap dunia yang mencakup aspek-aspek seperti tingkat bunga, jangka waktu, struktur pembayaran, dan konsekuensi politik serta ekonomi yang terkait. Kedua negara tersebut tentunya membutuhkan konsep manajemen utang yang efektif dan transparan untuk memastikan keberlanjutan keuangan jangka panjang dan menghindari risiko yang berlebihan.

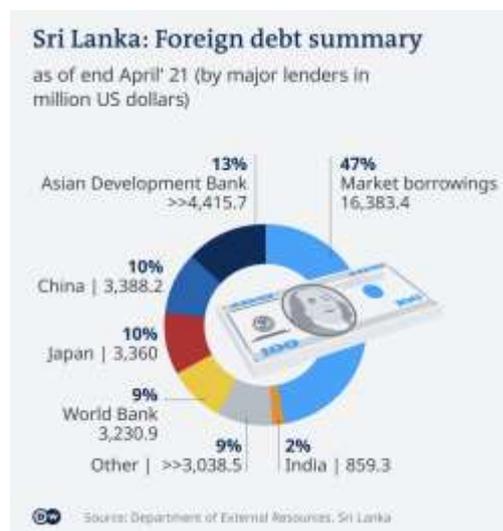
Bank Dunia (*World Bank*), didirikan pada tahun 1944, merupakan salah satu lembaga keuangan internasional terbesar yang menyediakan pinjaman dan bantuan teknis kepada negara-negara

berkembang untuk tujuan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Bank Dunia terdiri dari dua institusi utama: *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) dan *International Development Association* (IDA). IBRD memberikan pinjaman kepada negara-negara dengan pendapatan menengah dan rendah yang memiliki kapasitas kredit, sementara IDA memberikan hibah dan pinjaman tanpa bunga atau berbunga rendah kepada negara-negara dengan pendapatan sangat rendah. Melalui proyek-proyek pembangunan yang didanai, Bank Dunia berupaya untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor penting lainnya di negara-negara penerima (Darajati, 2020).

Pada tahun 2023, negara-negara dengan kewajiban utang terbesar kepada Bank Dunia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) termasuk campuran negara berkembang dan negara berkembang. Sepuluh negara dengan pinjaman tertinggi dari Bank Dunia adalah (Gautam, 2023):

1. India: \$20,7 miliar
2. Indonesia: \$19,8 miliar
3. Brasil: \$15,9 miliar
4. Tiongkok: \$ 15,6 miliar
5. Kolombia: \$15,0 miliar
6. Meksiko: \$15,0 miliar
7. Filipina: \$11,6 miliar
8. Turki: \$11,2 miliar
9. Argentina: \$9,5 miliar
10. Maroko: \$9,3 miliar

Sri Lanka, sebuah negara pulau di Asia Selatan, menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir yang menyebabkan peningkatan ketergantungan pada pinjaman internasional, termasuk dari Bank Dunia (World Bank). Untuk memahami konteks utang Sri Lanka ke World Bank, penting untuk terlebih dahulu memahami peran dan fungsi dari World Bank serta posisi Sri Lanka dalam urutan negara-negara yang memiliki hutang ke lembaga ini (Nurjayanti, 2020).



Gambar 1. Diagram Utang Sri Lanka

Meskipun tidak termasuk dalam sepuluh besar, Sri Lanka memiliki utang yang signifikan kepada Bank Dunia yang telah menjadi pemain penting dalam memberikan bantuan keuangan kepada negara ini di tengah-tengah perjuangan ekonominya. Pinjaman Bank Dunia kepada Sri Lanka ditujukan untuk mendukung sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang sangat penting untuk pembangunan jangka panjang dan pemulihan ekonomi negara ini. Manajemen utang dan strategi pembayaran utang negara-negara ini, termasuk Sri Lanka, sangat penting dalam perencanaan ekonomi dan hubungan keuangan internasional mereka (Kurniawan, 2023).

Sri Lanka telah menjadi penerima bantuan dari Bank Dunia selama beberapa dekade, memanfaatkan dana tersebut untuk berbagai proyek pembangunan. Namun, dalam beberapa tahun

terakhir, negara ini mengalami peningkatan signifikan dalam utang luar negerinya, termasuk utang ke Bank Dunia. Menurut laporan, Sri Lanka memiliki utang luar negeri yang mencapai sekitar \$35 miliar pada akhir 2020, dengan sekitar \$1,5 miliar berasal dari Bank Dunia. Hutang ini mencakup pinjaman untuk proyek infrastruktur, reformasi pendidikan, dan pengembangan layanan kesehatan, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat kapasitas ekonomi dan sosial negara (Aslam et al., 2022).

Namun, beban hutang yang meningkat telah menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan Sri Lanka untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Pada tahun 2022, Sri Lanka mengalami krisis ekonomi yang parah, diperburuk oleh penurunan tajam dalam pendapatan pariwisata akibat pandemi COVID-19, serta kenaikan harga minyak dan komoditas lainnya. Sri Lanka menyatakan kebangkrutan dan menanggukkan pembayaran kembali pinjaman lokal dan luar negeri senilai \$83 miliar di tengah krisis valuta asing yang parah. Presiden Sri Lanka berupaya untuk menunda pembayaran pinjaman hingga tahun 2028 sebagai bagian dari upaya untuk keluar dari kebangkrutan, dengan rencana untuk membayar utang dari tahun 2028 hingga 20423 (VOA:2024). Faktor-faktor yang turut berperan dalam krisis ekonomi Sri Lanka meliputi konflik dan perang saudara yang berkepanjangan serta isu korupsi dalam pemerintahan. Krisis ini mengakibatkan devaluasi mata uang, inflasi yang tinggi, dan kekurangan barang-barang dasar yang semuanya memperburuk situasi fiskal negara (Nurjayanti, 2020).

Menurut buku “Mekanisme Registrasi Indikasi Geografis” (2022) karya Talia Sopiyan, letak geografis mempengaruhi keanekaragaman jenis hewan, tumbuhan, dan sumber daya alam lainnya. Pengukuran geografis didasarkan pada garis lintang dan garis bujur yang membentuk suatu sistem koordinat. Dimana indikasi geografis ini juga memainkan peran dalam perekonomian suatu negara, mulai dari daya saing dan nilai tambah suatu produk, perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan ekonomi lokal, hingga kepada promosi kerjasama komunitas dan pelestarian tradisi. Kondisi geografis suatu negara dapat menjadi penilaian dalam kerjasama komunitas dalam suatu kawasan negara pun menjadi pertimbangan untuk menjalin kerjasama termasuk pada pemberian hutang dalam mendukung perekonomiannya. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang berbatasan dengan beberapa negara, batas-batas tersebut di antaranya terletak di sebelah utara yang dimana berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Samudera Pasifik. Kemudian, di sebelah selatan, Indonesia juga berbatasan dengan Australia, Timor Leste, Samudera Hindia, Laut Timor, Laut Arafura. Dan di sebelah barat Indonesia juga berbatasan dengan Samudera Hindia. Untuk di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2023 yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun dengan PDB per kapita sebesar Rp75,0 juta atau setara US\$4.919,7. Pada tahun 2023, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,05 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2022 sebesar 5,31 persen. Dalam aktivitas perekonomiannya, Indonesia memiliki aktivitas produksi yang cenderung kuat dan stabil.

Namun Indonesia membutuhkan investasi asing langsung (FDI) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan mencapai status negara maju pada tahun 2045. Investasi asing langsung atau yang dikenal dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) pun menjadi fokus pengelolaan perekonomian di Indonesia dengan dibukanya banyak lapangan pekerjaan melalui kerja sama dengan perusahaan asing, hingga ke pengembangan tempat wisata di Indonesia dengan penerimaan investasi asing. Dengan adanya penerimaan investasi langsung ini, hal ini turut berdampak pada utang luar negeri yang dimiliki suatu negara dikarenakan ketergantungan yang berlebihan pada utang luar negeri mungkin menunjukkan bahwa perekonomian suatu negara kurang menarik bagi investor asing, atau bahwa negara tersebut memiliki risiko kredit yang lebih tinggi. Di sisi lain, kuatnya arus masuk investasi asing dapat mengurangi kebutuhan meminjam dari luar negeri.



Gambar 2. Utang Indonesia 2024

Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Indonesia pada Januari 2024 lalu, menunjukkan utang luar negeri yang dimiliki Indonesia mengalami penurunan. Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2024 berada di angka 405,7 miliar dolar AS, lebih rendah daripada posisi ULN Desember 2023 yang mencapai 408,1 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN Indonesia meningkat 0,04% (year-on-year), lebih lambat daripada pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang mencapai 2,9% (year-on-year). Penurunan ULN ini disebabkan oleh berkurangnya utang luar negeri pemerintah dan sektor swasta.

Debt Management Office (DMO) merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh pemerintah Sri Lanka dan Indonesia untuk mengelola utang mereka dengan lebih efektif. DMO terdiri dari empat fungsi utama yang membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan utang. Pertama, layanan konsultasi kebijakan memberikan panduan dan saran kepada pemerintah tentang pengelolaan utang, termasuk analisis pasar keuangan dan identifikasi strategi yang sesuai. Kedua, hubungan dengan pemangku kepentingan membangun saluran komunikasi yang kuat dengan kreditor dan lembaga keuangan internasional yang penting untuk mendapatkan dukungan dan menjaga kredibilitas di pasar keuangan global. Ketiga, pemantauan risiko dan kepatuhan melibatkan evaluasi risiko-risiko yang terkait dengan utang, seperti fluktuasi suku bunga dan nilai tukar mata uang, serta memastikan kepatuhan terhadap perjanjian utang. Terakhir, pelaporan keuangan menyediakan informasi yang transparan dan akurat tentang keuangan pemerintah terkait utang yang penting untuk akuntabilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan. Melalui penerapan *Debt Management Office* (DMO), pemerintah Sri Lanka dan Indonesia dapat mengelola utang mereka dengan lebih efisien, meningkatkan keberlanjutan keuangan, dan meminimalkan risiko terkait dengan utang eksternal (Bhudiharty, 2020).

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur (Putrihapsari & Fauziah, 2020 dalam Nurjannah dan Mukaromah, 2021). Studi literatur menjadi langkah peneliti untuk menganalisis lebih jauh lagi terkait dengan kondisi yang terjadi berdasarkan data yang tertera pada kajian pustaka sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun tujuan dari peneliti menggunakan metode ini sebagai langkah awal perencanaan dalam sebuah penelitian yang memanfaatkan perpustakaan dalam rangka memperoleh data di lapangan tanpa perlu observasi ke lapangan.

Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang relevan. Adapun sumber data primer yang penulis gunakan berupa laporan penelitian, jurnal ilmiah, data hasil penelitian, dan sebagainya. Kemudian adapun sumber data sekundernya berupa peraturan dasar hukum pemerintah seperti peraturan menteri keuangan. Analisis isi adalah proses di mana peneliti mengupas teks secara objektif untuk mendapatkan pemahaman tentang isi secara keseluruhan, tanpa

intervensi peneliti, setelah memperoleh sumber data sebagai referensi. Dalam hal ini, peneliti akan membahas semua informasi yang ada di sumber data; untuk mencapai hasil, diperlukan waktu untuk membaca dan mempelajari informasi tersebut. Diharapkan hasil ini akan menawarkan solusi untuk masalah dan menjadi bahan pertimbangan saat merancang kebijakan utang luar negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Soekanto (1979 dalam Sampe;2022) berpendapat secara lebih sederhana menjelaskan Perbandingan adalah upaya untuk menemukan persamaan atau perbedaan antara dua gejala atau lebih. Persamaan dan perbedaan ini dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan hasil studi perbandingan para peneliti. Begitu pula dengan perbandingan yang berkaitan dengan pemerintahan, subjek penelitian adalah pemerintahan itu sendiri, dan penelitian tersebut dapat menjadi lebih spesifik untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Salah satu contohnya adalah perbandingan manajemen hutan antara pemerintahan Indonesia dan Sri Lanka, yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Utang suatu negara bisa membantu atau bahkan menjadi petaka bagi negara tersebut, hal itu bisa dilihat dari bagaimana mengelola utangnya. Menurut Mumun dan Sukarna (2005 dalam Ngamelubun dan Kusmaryo: 2018) menjelaskan bahwasannya utang luar negeri tidak memiliki dampak yang positif untuk makroekonomi karena menciptakan ketidakstabilan, hal tersebut seperti defisit anggaran, nilai tukar yang tidak tepat, dan sistem keuangan yang lemah. Meskipun demikian, kebijakan pembangunan melalui utang luar negeri masih banyak digunakan oleh negara berkembang (dalam Ngamelubun dan Kusmaryo: 2018). Dapat disimpulkan bahwasannya utang suatu negara bisa membantu atau bahkan menjadi petaka bagi negara tersebut, hal itu bisa dilihat dari bagaimana manajemen utang tersebut.

Menurut IMF dan World Bank (2003) dalam publikasinya *Guidelines for Public Debt Management* mendefinisikan manajemen utang pemerintah sebagai sebuah strategi pengelolaan utang pemerintah dibuat dan diterapkan untuk meningkatkan pendanaan yang diperlukan dengan mempertimbangkan risiko dan biaya, dan memenuhi tujuan pengelolaan utang pemerintah lainnya yang mungkin telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti membangun dan mempertahankan pasar surat berharga pemerintah yang efektif (dalam Suminto:2006).

Kebijakan utang luar negeri yang dibuat oleh sebuah negara biasanya dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Namun menurut World Bank perlu adanya suatu lembaga independen walaupun tidak wajib, dengan tujuan membahas tentang kebijakan utang luar negeri, oleh sebab itu World Bank menjelaskan perlu ada "Debt Management Office". Debt Management Office adalah sebuah kantor manajemen hutang yang bertanggung jawab merancang opsi-opsi dari sebuah strategi yang kemudian akan dipresentasikan kepada para pembuat kebijakan yang akan menyetujui ataupun tidak menyetujui dengan memperhatikan tingkat risiko pemerintah. DMO mengimplementasikan strategi setelah disetujui oleh para pembuat kebijakan, sebuah proses yang melibatkan kontak rutin dengan para pelaku pasar seperti pemberi pinjaman komersial dan resmi komersial dan resmi, dan dealer utama.

World Bank (2021) menyatakan bahwasannya bahwasannya DMO ini memiliki 4 fungsi yang nantinya juga akan dijadikan pisau analisis yakni Layanan konsultasi kebijakan, Hubungan dengan pemangku kepentingan, Pemantauan risiko dan kepatuhan, dan Pelaporan keuangan. Adapun pengertian lebih lanjut dan hasil analisisnya sebagai berikut:

Layanan Konsultasi Kebijakan

Perkembangan zaman serta modernisasi yang senantiasa bergulir menuntut sikap siaga dari setiap negara untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam program pembangunan. Pemenuhan akan kebutuhan tersebut memerlukan biaya besar, yang terkadang melampaui batas kemampuan negara untuk mengakomodir pembiayaan tersebut secara mandiri. Maka dari itu, jalinan kerja sama antar negara dilakukan diantaranya agar memperoleh bantuan pendanaan melalui skema peminjaman atau utang. Pada sisi positif, kelonggaran dana yang digelontorkan melalui peminjaman utang tersebut dapat menopang perekonomian negara setidaknya untuk tetap mempertahankan kontinuitas dalam pembangunan, akan tetapi di sisi lain apabila manajemen utang tersebut tidak dikelola atau tidak dibersamai dengan kebijakan-kebijakan yang bijaksana maka sebaliknya akan menjadi *blunder* yang justru merugikan negara. Sebuah kerangka manajemen risiko (*risk management framework*) harus dibangun untuk memungkinkan manajer utang mengidentifikasi dan memenej "trade-off" antara

ongkos—baik *financial cost* maupun *potential cost of real economic losses*—dan risiko dalam portofolio utangnya.¹ Dalam hal ini, layanan konsultasi kebijakan pada Debt Management Office (DMO) selaku pemangku tanggung jawab manajemen utang negara tersebut menjadi kebutuhan pendukung untuk menunjang analisis risiko dalam pembentukan kebijakan ideal yang mampu meminimalisir kerugian.

“Manajemen risiko mendapatkan tekanan yang besar mengingat dalam “*globalized economy*” pemerintah menghadapi berbagai risiko dalam manajemen utangnya, seperti *market risk* (risiko yang berkaitan dengan fluktuasi suku bunga, nilai tukar mata uang, harga komoditi, dan inflasi), *funding risk* (risiko yang berkaitan dengan akses pasar ketika pemerintah memerlukan dana untuk pembiayaan anggaran ataupun *roll-over* utang pada tingkat biaya yang dapat diterima), *liquidity risk* (berkenaan dengan manajemen kas pemerintah), *credit risk* (berkaitan dengan rating pihak bersangkutan), *portfolio concentration risk* (berkaitan dengan konsentrasi eksposur pada instrument, transaksi individual, pasar, industri, atau kreditur tertentu), serta *operational risk* (risiko berkaitan dengan kemungkinan kesalahan pada prosedur, *human error*, dan *system*, yang mencakup masalah-masalah audit, *compliance* dan control, keberlangsungan bisnis, legal, *key person*, reputasi, *security*, *system*, dan transaksi).” (dalam Storkey, 2000; IMF dan World Bank, 2003a; Das, 2006a)

Mengutip dari World Bank (2010), layanan konsultasi kebijakan memiliki fungsi strategis diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan saran terhadap kebijakan beserta kemungkinan respon yang akan diterima terkait pengembangan pasar obligasi pemerintah baik primer maupun sekunder, pemberian jaminan pemerintah kepada entitas sektor publik dan swasta atau, pinjaman dana pemerintah kepada entitas-entitas yang sama (jika relevan dan bergantung pada negaranya), pengembangan produk baru atau rancangan strategi pendanaan pemerintah.
2. Mengevaluasi permintaan pendanaan oleh BUMN dan BUMD untuk dibuatkan kontrak utang baru atau kemungkinan pinjaman oleh pemerintah pusat dan evaluasi biaya atau harga yang diharapkan berikut risiko kewajiban kontinjensinya.
3. Membantu instansi pemerintahan lainnya (termasuk di dalam kementerian keuangan) dalam hal pemberian saran atas isu-isu yang membutuhkan keahlian pasar modal.

Sri Lanka

Lembaga layanan konsultasi kebijakan belum dikembangkan atau berdiri secara independen di negara-negara berkembang baik Sri Lanka maupun Indonesia. Pengelola administrasi utang dalam negeri (yang dalam hal ini merangkap sebagai pembentuk kebijakan) di Sri Lanka dipertanggung jawabkan oleh Departemen Pengelolaan Utang Publik atau *Public Debt Department* yang merupakan lembaga di bawah naungan Bank Sentral Sri Lanka (CBSL). Sedangkan fitur layanan konsultasi kebijakan terutama mengenai masalah makro ekonomi dan kebijakan fiskal (termasuk utang), cenderung dilaksanakan oleh institusi atau lembaga otonom seperti *Institute of Policy Studies of Sri Lanka*.

Public Debt Department bertanggung jawab atas jaminan pemenuhan kebutuhan pembiayaan pemerintah dengan biaya dan risiko serendah mungkin serta pengembangan dan penguatan pasar surat berharga pemerintah demi memelihara efisiensi dan stabilitas. Salah satu fokus departemen berikut dalam strategi pengelolaan utang di Sri Lanka yang berkenaan dengan layanan konsultasi kebijakan adalah untuk memberikan nasihat kepada Kementerian Keuangan mengenai strategi pengelolaan utang yang tepat, dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi dan pasar yang berlaku. Sehingga, kebijakan pengelolaan utang didasari oleh berbagai pertimbangan seperti kondisi dan selera pasar, perkembangan moneter, profil jatuh tempo, risiko dalam portofolio utang, dan sebagainya. Adapun pendirian *Institute of Policy Studies of Sri Lanka* (IPS) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Parlemen pada bulan Desember 1988 dikonstruksikan sebagai lembaga riset otonom yang bergerak pada isu pembangunan sosial-ekonomi untuk memperkuat kapasitas analisis kebijakan jangka menengah di Sri Lanka. Fokus utama yang dijalankan oleh IPS adalah untuk memberikan analisis terpadu mengenai tantangan pembangunan jangka menengah dan panjang Sri Lanka, diantaranya mencakup 1) kebijakan makroekonomi; 2) kebijakan ekonomi internasional; 3) kebijakan ketenagakerjaan, ketenagakerjaan, dan pengembangan sumber daya manusia; 4) industri, daya saing

¹ Suminto, M. S. (2006). Manajemen Utang Pemerintah: Best Practices dan Pengalaman Indonesia. *Majalah Treasury Indonesia*, (2).

dan kebijakan regulasi; 5) kebijakan kemiskinan dan kesejahteraan sosial; 6) kebijakan ekonomi pertanian; 7) kebijakan ekonomi lingkungan; dan 8) kebijakan ekonomi kesehatan.²

Indonesia

Sama halnya seperti Sri Lanka, layanan konsultasi kebijakan utang di Indonesia masih terselubung ke dalam tanggung jawab lembaga pengelola utang negara yakni Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) yang bertugas di bawah naungan Kementerian Keuangan. DJPPR memiliki tugas dalam mempertanggung jawabkan manajemen utang pemerintah (baik domestik maupun internasional), mengelola risiko pembiayaan pemerintah, serta merencanakan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dan risiko keuangan. Peran DJPPR dalam hal ini lebih ditekankan pada manajemen operasional kebijakan dan bukan pada penyediaan layanan konsultasi kebijakan. Sedangkan proses perumusan rekomendasi atau saran terhadap kebijakan utang negara cenderung mengandalkan lembaga riset atau akademisi yang ahli dibidangnya sebagaimana proses perumusan kebijakan publik pada umumnya dan akan dikoordinasikan kembali oleh unit DJPPR atau bersama Kementerian Keuangan secara langsung, seperti Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Berdasarkan laman resmi BKF, badan ini merupakan unit setingkat Eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan, dengan lingkup tugas meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan, sektor keuangan dan kerja sama internasional. Selain itu, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, BKF memiliki beberapa fungsi yakni sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam bidang fiskal, sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
2. Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam bidang fiskal dan sektor keuangan;
3. Pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam bidang fiskal, sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
5. Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan

Hubungan dengan Kreditor

Sri Lanka

Sri Lanka memiliki hubungan yang kompleks dengan kreditornya, termasuk negara-negara G7, China, dan India (Weerakoon & Jayasuriya, 2019). Negara ini telah lama bergantung pada pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunannya dan ini telah membuatnya rentan terhadap tekanan dari kreditornya. Pada tahun 2022, Sri Lanka mengalami krisis utang yang menyebabkan *default* pada obligasi internasionalnya. Krisis ini sebagian disebabkan oleh kegagalan Sri Lanka untuk bernegosiasi dengan kreditornya secara efektif untuk merestrukturisasi utangnya.

Indonesia

Indonesia memiliki hubungan yang lebih stabil dengan kreditornya. Negara ini memiliki rasio utang terhadap PDB yang lebih rendah daripada Sri Lanka dan telah berhasil mengelola utangnya secara berkelanjutan selama bertahun-tahun (Nurjayanti, 2020). Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan rasio utang Indonesia sebesar 38,6% terhadap PDB. Hal ini lebih rendah dari Sri Lanka yang memiliki rasio utang sebesar 103,9% dari PDB (CEIC, 2023). Indonesia juga memiliki kerangka kerja hukum yang kuat untuk mengelola utang publik dan ini telah membantu membangun kepercayaan dengan kreditor.

Hubungan dengan Sektor Swasta

Sri Lanka

Sri Lanka menghadapi tantangan dalam membangun hubungan yang kuat dengan sektor swastanya. Sebagai negara dengan sektor swasta yang relatif kecil dan kurang berkembang, Sri Lanka mengalami keterbatasan dalam mengakses pendanaan dari pasar domestik (Arif et al., 2022). Hal ini

² *Institute of Policy Studies of Sri Lanka*. (n.d.). Retrieved from ips.lk: <https://www.ips.lk/>

disebabkan oleh keterbatasan dalam daya beli dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Krisis utang yang melanda Sri Lanka pada tahun 2022 memperburuk kondisi ini dengan dampak negatifnya terhadap hubungan antara pemerintah dan sektor swasta. Banyak perusahaan menjadi enggan untuk berinvestasi di Sri Lanka karena ketidakpastian ekonomi yang meningkat dan ketidakstabilan keuangan yang terkait dengan krisis utang tersebut.

Situasi ini menunjukkan perlunya langkah-langkah konkret untuk memperkuat sektor swasta Sri Lanka dan membangun kembali kepercayaan antara pemerintah dan pelaku bisnis. Diperlukan reformasi yang menyeluruh untuk meningkatkan iklim investasi dan membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor swasta. Selain itu, pemerintah Sri Lanka perlu mengadopsi kebijakan yang lebih pro-bisnis dan memberikan insentif yang menarik bagi investor domestik maupun asing. Dengan langkah-langkah tersebut, Sri Lanka dapat memperbaiki hubungannya dengan sektor swastanya dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia

Indonesia memperlihatkan hubungan yang kuat dengan sektor swastanya yang besar dan berkembang. Seiring dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat, sektor swasta Indonesia telah menjadi sumber pendanaan penting bagi pemerintah (Khasanah et al., 2023). Dukungan yang kuat dari sektor swasta telah memainkan peran kunci dalam menyediakan dana untuk proyek-proyek pembangunan dan program-program pemerintah lainnya. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan iklim investasi juga telah berdampak positif pada hubungan antara pemerintah dan sektor swasta. Melalui berbagai reformasi kebijakan dan pembangunan infrastruktur, Indonesia berhasil menarik minat investor asing yang lebih besar ke dalam pasar domestiknya.

Tindakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan investasi dan memperkuat hubungan dengan sektor swasta juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis domestik. Dengan mendorong inovasi dan memberikan dukungan kepada pelaku bisnis lokal, pemerintah telah membantu sektor swasta untuk berkembang lebih lanjut. Kemitraan yang erat antara pemerintah dan sektor swasta Indonesia tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga membuka peluang baru bagi investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hubungan dengan Masyarakat Sipil

Sri Lanka

Masyarakat sipil Sri Lanka telah secara aktif mengkritik pemerintah atas pengelolaan utangnya, terutama terfokus pada kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan utang dan dampak negatifnya terhadap ekonomi serta masyarakat Sri Lanka. Kritik ini semakin diperkuat oleh krisis utang 2022, yang telah menyoroti kebutuhan akan reformasi signifikan dalam cara pemerintah mengelola utangnya. Studi oleh Perdiya et al (2023) menekankan pentingnya respon yang lebih transparan dan bertanggung jawab dari pemerintah terhadap kebijakan utang, serta perlunya keterlibatan lebih luas dari masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan terkait utang negara.

Dengan demikian, masyarakat sipil Sri Lanka memainkan peran kunci dalam menekankan perlunya perubahan substansial dalam pendekatan pemerintah terhadap utang. Tuntutan mereka untuk reformasi mencerminkan keinginan akan proses kebijakan yang lebih terbuka, serta perlunya pertimbangan yang lebih mendalam akan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan utang. Dengan mengambil inspirasi dari kritik ini, pemerintah Sri Lanka dapat memperbaiki transparansi dalam pengelolaan utangnya dan memastikan bahwa keputusan terkait utang lebih memperhitungkan kepentingan jangka panjang masyarakat.

Indonesia

Masyarakat sipil Indonesia juga turut aktif dalam mengawasi pengelolaan utang pemerintah. Namun, dibandingkan dengan Sri Lanka, kritik terhadap pengelolaan utang di Indonesia umumnya lebih moderat. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti rasio utang terhadap PDB yang lebih rendah di Indonesia serta sejarah pengelolaan utang yang lebih baik. Dengan kondisi ekonomi yang relatif stabil dan pengelolaan utang yang lebih terkendali, masyarakat sipil cenderung memberikan kritik yang lebih bertujuan pada perbaikan proses dan kebijakan, daripada menyoroti krisis yang mendalam atau kekurangan transparansi yang mencolok. Meskipun begitu, partisipasi aktif

masyarakat sipil tetap penting dalam memastikan bahwa pengelolaan utang tetap memperhitungkan kepentingan jangka panjang masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemantauan Risiko dan Kepatuhan

Manajemen utang merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan negara. Ketika dikelola dengan baik, utang dapat menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, jika tidak terkendali, utang dapat menjadi beban berat dan berujung pada krisis ekonomi.

Berdasarkan data penelitian *Center of Economic and Law Studies (Celios)*, pada tahun 2022 utang luar negeri Indonesia mencapai 20,225 miliar dollar AS atau setara Rp 315,1 triliun, yang meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya perangkap utang atau *debt trap*. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu menyiapkan langkah mitigasi agar tidak bernasib serupa dengan beberapa negara yang terjerat, seperti Kenya, Sri Lanka, dan Pakistan.

Sri Lanka, sebagai contoh, telah mengalami *debt trap* akibat penggunaan utang luar negeri yang berlebihan. Negara tersebut telah mengambil utang luar negeri sebesar US\$ 209 juta untuk membangun infrastruktur, tetapi proyek tersebut gagal memenuhi ekspektasi dan menyebabkan negara tersebut jatuh dalam kepanikan ekonomi. DMO dapat membantu Sri Lanka dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko tersebut, sehingga dapat mencegah terjadinya kejadian buruk seperti *debt trap*.

Dalam konteks DMO, World Bank telah menggunakan beberapa indikator untuk memantau risiko dan kepatuhan negara-negara. Indikator tersebut meliputi rasio utang luar negeri terhadap PDB, rasio utang luar negeri terhadap pendapatan negara, dan rasio utang luar negeri terhadap pendapatan per kapita. Rasio utang luar negeri terhadap PDB adalah salah satu indikator yang paling penting dalam memantau risiko utang luar negeri. Rasio ini menunjukkan seberapa besar utang luar negeri yang digunakan oleh negara dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika rasio ini melebihi 64%, maka negara tersebut telah memasuki zona risiko yang tinggi.

Salah satu pendekatan yang paling efektif adalah dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Indikator kinerja ini dapat membantu World Bank dalam memantau kemampuan negara-negara dalam memenuhi kewajiban utang mereka dan memperbaiki kebijakan moneter dan fiskal mereka. Selain itu, World Bank juga telah mengembangkan beberapa pendekatan lain untuk memantau risiko dan kepatuhan utang negara-negara. Salah satu pendekatan yang paling efektif adalah dengan menggunakan analisis risiko yang terintegrasi. Analisis risiko ini dapat membantu World Bank dalam memantau kemampuan negara-negara dalam memenuhi kewajiban utang mereka dan memperbaiki kebijakan moneter dan fiskal mereka.

Pendekatan DMO utang negara Indonesia dan Sri Lanka terhadap World Bank memerlukan analisis yang komprehensif dan terintegrasi. Keduanya harus memantau risiko dan kepatuhan utang mereka dengan lebih hati-hati dan memperbaiki kebijakan moneter dan fiskal mereka. World Bank juga harus terus mengembangkan pendekatan-pendekatan yang lebih efektif untuk memantau risiko dan kepatuhan utang negara-negara. Hasil merupakan bagian utama artikel ilmiah, berisi: hasil bersih tanpa proses analisis data, hasil pengujian hipotesis. Hasil dapat disajikan dengan tabel atau grafik, untuk memperjelas hasil secara verbal. Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Tujuan pembahasan adalah menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan temuan dari penelitian kedalam kumpulan pengetahuan yang telah ada dan menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada. Hasil dan temuan penelitian harus dapat menyelesaikan atau memberikan penjelasan untuk pertanyaan yang dinyatakan dalam pendahuluan.

Pelaporan Keuangan

Pada setiap keuangan negara harus memiliki pelaporan keuangan yang akurat dan terperinci guna memberikan informasi terhadap penduduk maupun pihak eksternal seperti badan pemberi utang. Laporan yang disajikan setiap negara akan menjadi krusial sebab dapat menentukan kondisi ekonomi suatu negara. Laporan keuangan harus dilakukan analisis dengan detail yang menggunakan beberapa metode tertentu agar menghasilkan laporan yang tepat. Hasil laporan keuangan suatu negara akan bermanfaat bagi berbagai pihak seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. Menurut Harahap (2011:190), Analisis laporan keuangan adalah proses memecah informasi dalam laporan keuangan menjadi bagian yang lebih kecil dan melihat hubungan antara data kuantitatif dan non kuantitatif yang penting. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui lebih banyak tentang kondisi keuangan, yang sangat penting untuk membuat

keputusan yang tepat. Untuk dapat melakukan analisa laporan keuangan, seorang analis diperlukan untuk memperhatikan setiap detail dari komponen laporan. Analisis harus dapat mengidentifikasi, mengolah, menilai, mempelajari, hingga membandingkan. Hasil yang dikeluarkan dalam laporan keuangan akan memunculkan kondisi keuangan dari suatu negara atau perusahaan sehingga dapat dijadikan rujukan untuk mengambil keputusan, terutama dalam berutang.

Pelaporan keuangan yang dilakukan oleh setiap negara harus mencakup informasi umum keuangan suatu negara seperti komponen informasi yang diperlukan. Informasi tersebut harus dilaporkan secara transparan dan dapat diakses dengan mudah untuk umum. Indonesia dan Sri Lanka harus menyediakan pelaporan keuangan tersebut melalui Kementerian Keuangan di negara masing-masing yang relevan dan dapat dipercaya sehingga para pemangku kepentingan seperti pemerintah, investor, dan masyarakat umum dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu negara. Pelaporan keuangan ini memiliki tujuan tertentu, diantaranya:

- Mengetahui perubahan posisi keuangan pada periode tertentu
- Menilai kinerja manajemen
- Mengetahui kelebihan dan kelemahan dalam suatu negara atau perusahaan
- Mengetahui langkah atau keputusan yang akan diambil
- Sebagai bahan pertimbangan pihak investor atau pemilik modal

Melakukan pelaporan keuangan dilakukan dengan analisis metode pelaporan, menurut Kasmir (2013:69) terdapat metode analisis vertikal dan horizontal dalam laporan keuangan yang dapat digunakan, diantaranya:

1. Analisis Vertikal

Analisis dengan metode ini dilakukan terhadap satu periode laporan keuangan saja. Informasi yang didapatkan hanya satu periode tersebut dan tidak dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan negara dari periode ke periode.

2. Analisis Horizontal

Analisis dengan metode ini dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan ke dalam beberapa periode untuk melihat perkembangan negara dari setiap periodenya.

Indonesia dan Sri Lanka merupakan negara yang memiliki utang terhadap World Bank. Keduanya memiliki utang yang cukup signifikan dalam berutang. Penggunaan utang dari kedua negara berbeda, Indonesia menggunakan utang untuk pembangunan jalan, jembatan, dan kereta api, sedangkan Sri Lanka menggunakan untuk pembangunan pelabuhan dan pembangkit listrik.

Indonesia saat ini memiliki utang luar negeri (ULN) sebanyak 405,7 miliar dolar AS per Januari tahun 2024, data tersebut dilansir dari Statistik Utang Luar Negeri Indonesia. Angka tersebut menurun dari bulan Desember 2023 lalu yang berada di angka 408,1 miliar dolar AS. Data tersebut dapat kita akses melalui laman resmi Kementerian Keuangan Indonesia. Data tersebut berasal dari pelaporan keuangan suatu negara yang dapat diakses oleh siapapun untuk kepentingan ekonomi Indonesia terhadap pemodal atau pemberi pinjaman. Menurut Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, saat ini utang yang dimiliki Indonesia mengalami penurunan. Hal itu menjadi kabar baik bagi negara karena dapat mengurangi beban pengeluaran negara. Beberapa sektor publik dan swasta menjadi peranan penting dalam mengurangi beban utang negara. Peran tersebut didukung dengan pengelolaan ULN yang sangat hati-hati, efisien, dan akuntabel dengan memfokuskan dukungan biaya kepada sektor publik seperti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,1% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,0%), Jasa Pendidikan (16,9%), Kontruksi (13,7%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,7%). Di sektor swasta, ULN swasta mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 3,2% (dari lembaga keuangan) dan 2,4% (dari perusahaan bukan lembaga keuangan).

Pada tahun 2022 lalu, ramai diperbincangkan bahwa Sri Lanka untuk pertama kalinya tidak dapat membayar utang luar negerinya ke beberapa negara, salah satu yang paling besarnya adalah terhadap China. Utang Sri Lanka ini mencapai hingga 104%, angka tersebut merupakan angka yang sudah melewati ambang batas yang telah ditentukan yaitu sebesar 60%. Penyebab gagalnya Sri Lanka dalam mengelola utang luar negerinya adalah tingginya angka ketergantungan Sri Lanka terhadap barang impor. Sebagian besar pasokan barang dan pangan di Sri Lanka sebagian besar hasil impor, hal tersebut kemudian membuat angka pengeluaran negara menjadi membengkak. Kondisi ini terjadi

akibat pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Sri Lanka tidak tepat sehingga memunculkan keputusan yang keliru bagi negara.

SIMPULAN

Sri Lanka dan Indonesia merupakan dua negara di Asia Tenggara dengan kondisi ekonomi yang terbilang stabil. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Sri Lanka mengalami krisis utang yang berakibat fatal pada perekonomiannya, sebagian besar disebabkan oleh unsustainable debt management practices. Di sisi lain, Indonesia menunjukkan pengelolaan utang yang lebih prudent dan terhindar dari krisis serupa. Pendekatan DMO (*Debt Management Office*) dapat digunakan untuk menganalisis dan membandingkan manajemen utang kedua negara ini. DMO, atau Lembaga Pengelola Utang, merupakan institusi yang bertanggung jawab untuk merumuskan strategi dan kebijakan pengelolaan utang publik. DMO sendiri menitikberatkan pada empat fungsi utama, yaitu Layanan konsultasi kebijakan, Hubungan dengan pemangku kepentingan, Pemantauan risiko dan kepatuhan, dan Pelaporan Keuangan.

Pertama, Layanan konsultasi kebijakan memberikan panduan dan saran kepada pemerintah tentang pengelolaan utang, termasuk analisis pasar keuangan dan identifikasi strategi yang sesuai. Sri Lanka dan Indonesia membutuhkan panduan dan saran ahli dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan utang mereka. DMO dapat menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk menganalisis kondisi utang, seperti tingkat bunga, jangka waktu, dan struktur pembayaran. Dengan menggunakan layanan konsultasi kebijakan dari DMO, kedua negara dapat mengoptimalkan kondisi pinjaman utang mereka.

Kedua, Hubungan dengan pemangku kepentingan membangun saluran komunikasi yang kuat dengan kreditur dan lembaga keuangan internasional yang penting untuk mendapatkan dukungan dan menjaga kredibilitas di pasar keuangan global. DMO dapat berperan sebagai perantara dalam memfasilitasi dialog yang terbuka dan konstruktif antara kedua belah pihak. Hal ini membantu menciptakan saluran komunikasi yang efektif dan membangun kepercayaan yang diperlukan untuk menegosiasikan kondisi utang yang menguntungkan bagi kedua negara.

Ketiga, Pemantauan risiko dan kepatuhan melibatkan evaluasi risiko-risiko yang terkait dengan utang, seperti fluktuasi suku bunga dan nilai tukar mata uang, serta memastikan kepatuhan terhadap perjanjian utang. Pendekatan DMO utang negara Indonesia dan Sri Lanka terhadap World Bank memerlukan analisis yang komprehensif dan terintegrasi. Keduanya harus memantau risiko dan kepatuhan utang mereka dengan lebih hati-hati dan memperbaiki kebijakan moneter dan fiskal mereka. World Bank juga harus terus mengembangkan pendekatan-pendekatan yang lebih efektif untuk memantau risiko dan kepatuhan utang negara-negara.

Terakhir, Pelaporan Keuangan. Sri Lanka dan Indonesia harus menyediakan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat terkait dengan utang kedua negara tersebut kepada World Bank. Pelaporan keuangan yang dilakukan oleh setiap negara harus mencakup informasi umum keuangan suatu negara seperti komponen informasi yang diperlukan. Informasi tersebut harus dilaporkan secara transparan dan dapat diakses dengan mudah untuk umum. DMO dapat membantu dalam menyusun dan menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, investor, dan masyarakat umum. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, kedua negara dapat membangun kepercayaan dan keyakinan di pasar keuangan global yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko dan biaya pinjaman masa depan (Dawud & Hidayat, 2019).

Secara keseluruhan, pendekatan DMO dalam penanganan utang negara Indonesia dan Sri Lanka terhadap World Bank menunjukkan kesamaan dalam prinsip dasar tetapi berbeda dalam implementasi sesuai dengan konteks masing-masing negara. Layanan konsultasi kebijakan, hubungan dengan pemangku kepentingan, pemantauan risiko dan kepatuhan, serta pelaporan keuangan adalah empat pilar utama yang diterapkan dalam pengelolaan utang.

DMO Indonesia, dengan struktur dan mandat yang kuat, serta strategi pengelolaan utang yang komprehensif, telah berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dan keberlanjutan fiskal negara. Sebaliknya, DMO Sri Lanka, yang memiliki kelemahan struktural dan membuat beberapa keputusan yang tidak bijaksana, berkontribusi pada krisis utang yang parah di negara tersebut. Pengalaman kedua negara ini memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara lain yang sedang mengembangkan

strategi pengelolaan utang mereka. Dengan menerapkan praktik terbaik dari DMO Indonesia, negara-negara lain dapat menghindari jebakan utang dan mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Aribowo, N. C., Damayanti, A. Y., & Bharata, R. W. (2023). Analisis Manajemen Utang Terhadap Penilaian Risiko Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2022. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 57–65.
- Arif, A., Sadiq, M., Shabbir, M. S., Yahya, G., Zamir, A., & Bares Lopez, L. (2022). The role of globalization in financial development, trade openness and sustainable environmental -economic growth: evidence from selected South Asian economies. *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 12(4), 1027–1044. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1861865>
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. (n.d.). Retrieved from fiskal.kemenkeu.go.id: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/CEIC>. (2023). *Sri-Lanka Utang Pemerintah*. CEIC Data. <https://www.ceicdata.com/id/indicator/sri-lanka/government-debt--of-nominal-gdp>
- Bhudiharty, S. (2020). Studi Komparatif: Penerapan Program Destination Management Organization (Dmo) Kementerian Pariwisata Pada Destinasi Wisata Kota Tua Jakarta. *Jurnal Industri Pariwisata*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.36441/pariwisata.v3i1.42>
- Dawud, N. A., & Hidayat, I. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Struktur Asset, Growth Opportunity, Non-Debt Tax Shield, Dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 8(2), 1–21.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (n.d.). Retrieved from [djppr.kemenkeu.go.id](https://www.djppr.kemenkeu.go.id): [https://www.djppr.kemenkeu.go.id/Institute of Policy Studies of Sri Lanka](https://www.djppr.kemenkeu.go.id/Institute%20of%20Policy%20Studies%20of%20Sri%20Lanka). (n.d.). Retrieved from [ips.lk](https://www.ips.lk): <https://www.ips.lk/>
- Ghani. “Krisis Sri Lanka dan Jebakan Utang Cina.” *Universitas Airlangga*, Unair.ac.id, 4 July 2022, <https://unair.ac.id/krisis-sri-lanka-dan-jebakan-utang-cina/>. Accessed 27 April 2024.
- Khasanah, M., B. A. M., Satiadharma, M., & Supriandi. (2023). Peran Kewirausahaan Sosialis dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*, 1(03), 226–235. <https://doi.org/10.58812/jekws.v1i03.528>
- Ministry of Finance, Economic Stabilization & National Policies. (n.d.). Retrieved from [treasury.gov.lk](https://www.treasury.gov.lk): <https://www.treasury.gov.lk/>
- Ngamelubun dan Kusmaryo. (2018). *Efektivitas Pertukaran Utang (Debt Swaps) Sebagai Alternatif Manajemen Utang Luar Negeri*. Retrieved April 13, 2024, from https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57213515/DANIEL_J_B_NGAMELUBUN_14.8059__Artikel2018-libre.pdf?1534753799=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DEfektivitas_Pertukaran_Utang_Debt_Swaps.pdf&Expires=1712980508&Signature=bexVAn~fetVUJe76l~SNe
- Nurjayanti, V. A. (2020). Analisis Ketergantungan China-Sri Lanka dalam Proyek Pembangunan Pelabuhan Hambantota Tahun 2007-2017. *Nation State Journal of International Studies*, 3(1), 71–83. <https://doi.org/10.24076/nsjis.2020v3i1.195>
- Perdija, A., Ginting, B., Deliana Hz, E., & Diana, L. (2023). Peran Organisasi Moneter Internasional Dalam Pemulihan Ekonomi Sri Lanka Perspektif Hukum Ekonomi Internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023(16), 67–75. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8232143>
- Putra, I. G. S., Affandi, H. A. A., Purnamasari, L., & Sunarsi, D. (2021). Analisis Laporan Keuangan. Cipta Media Nusantara.
- Sirait, P. (2021). Pelaporan dan laporan keuangan. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16456/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=yhttps://www.cnbcindonesia.com/news/20220624082123-4-349896/sri-lanka-bangkrut-gegara-jebakan-batman-utang-china>
- Situmorang, H., Lumbantoruan, R., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2022). The Influence of Profitability, Liquidity, Leverage and Growth on Economic Profitability of PT. Indika Energy, Tbk Year 2016-2021. *Fundamental Management Journal*, 7(1), 123–153.

- Sampe, Stefanus. *Perbandingan Sistem Perbandingan*. Menado, Universitas Sam Ratulangi, 2022, file:///C:/Users/rizki/Downloads/Buku%20Perbandingan%20Sistem%20Pemerintahan-1.pdf. Accessed 26 April 2024.
- Suminto, M. S. (2006). Manajemen Utang Pemerintah: Best Practices dan Pengalaman Indonesia. *Majalah Treasury Indonesia*, (2).
- VOA. "Sri Lanka Berupaya Tunda Bayar Pinjaman Hingga 2028 di Tengah Krisis Ekonomi." *VOA Indonesia*, VOA Indonesia, 6 March 2024, <https://www.voaindonesia.com/a/sri-lanka-berupaya-tunda-bayar-pinjaman-hingga-2028-di-tengah-krisis-ekonomi/7516088.html>. Accessed 27 April 2024.
- Weerakoon, D., & Jayasuriya, S. (2019). *Debt Financing for Development: The Sri Lankan Experience* (hal. 95–112). https://doi.org/10.1007/978-981-13-1864-1_6
- World Bank. (2001). *Guidelines for Public Debt Management*. IMF.
- Zainab, H., & Bastian, I. (2020). Hospital Financial Reports of Debt and Receivable in Jkn Era : A Case Study RS ABC. *E-Prosiding Akuntansi*, 1–16.